

Profil Wakil Presiden dari Masa ke Masa

Oleh: Dewa Samsara

Pendahuluan

Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak kemerdekaan 1945 memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kelangsungan pemerintahan, stabilitas politik, serta pelaksanaan kebijakan nasional. Posisi ini awalnya dirancang sebagai pendamping presiden sekaligus sebagai penjaga kesinambungan pemerintahan jika terjadi kekosongan jabatan presiden.

Perjalanan wakil presiden dari Mohammad Hatta hingga Gibran Rakabuming Raka menunjukkan evolusi peran dari sekadar simbolis menjadi figur yang aktif dalam diplomasi, administrasi, pembangunan ekonomi, dan modernisasi birokrasi. Selain itu, latar belakang setiap Wapres—mulai dari teknokrat, militer, politisi, ulama, hingga figur muda—menunjukkan adaptasi jabatan terhadap dinamika sosial-politik, ekonomi, dan teknologi yang berkembang seiring waktu. Kajian ini bertujuan untuk menelaah profil seluruh wakil presiden Indonesia, melihat kontribusi mereka dalam pembangunan nasional, serta menilai bagaimana peran Wapres bertransformasi sesuai tuntutan setiap era.

Periode 1: Masa Kemerdekaan dan Orde Lama (1945–1956)

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa konsolidasi pemerintahan, konflik internal, dan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Posisi Wakil Presiden pada periode ini bukan hanya sebagai pendamping presiden, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun fondasi tata kelola negara yang stabil. Wakil Presiden diharapkan memiliki kapasitas intelektual, kemampuan diplomasi, dan kredibilitas moral yang tinggi untuk memastikan kelangsungan pemerintah muda yang masih rapuh. Pada era ini, satu-satunya wakil presiden adalah Mohammad Hatta, figur yang menjadi simbol integritas, intelektualitas, dan keteguhan prinsip (Santoso, 2008:44).

1. Mohammad Hatta (1945–1956)



Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, berperan sangat strategis dalam merumuskan kebijakan dasar pemerintahan dan pembangunan nasional. Latar belakangnya sebagai ekonom dan tokoh pergerakan memungkinkannya menyeimbangkan kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial dalam membangun negara baru. Hatta juga berfungsi sebagai mediator antara berbagai kelompok politik, termasuk antara Presiden Soekarno dan parlemen, untuk menjaga stabilitas politik di tengah tekanan revolusi dan tantangan internasional (Noor, 2017:58). Peran Hatta semakin menonjol dalam diplomasi internasional, memastikan pengakuan kedaulatan Indonesia dan menjalin

hubungan bilateral yang menguntungkan. Ia juga memperkenalkan konsep ekonomi kerakyatan dan koperasi sebagai fondasi pembangunan nasional. Meskipun akhirnya mengundurkan diri pada 1956 akibat perbedaan pandangan politik, kontribusi Hatta dalam memperkuat sistem pemerintahan dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi parlementer menjadi pijakan penting bagi perjalanan politik Indonesia selanjutnya (Rahman, 2004:91).

Periode 2: Orde Baru Awal (1973–1988)

Era Orde Baru ditandai oleh stabilitas politik yang tinggi namun dibangun melalui kontrol yang ketat terhadap kekuatan politik. Wakil Presiden pada masa ini memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi pemerintahan, menjembatani kepentingan elit politik, serta

mendukung program pembangunan nasional yang ambisius. Posisi Wapres juga sering digunakan untuk memperkuat hubungan pusat-daerah dan mengawasi birokrasi agar sejalan dengan tujuan pemerintahan. Periode ini menekankan perpaduan antara kepemimpinan tradisional dan modernisasi administrasi negara (Hidayat, 2014:144).

2. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973–1978)



Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai tokoh yang memadukan nilai tradisional dengan keterampilan administratif modern. Pengalaman panjangnya dalam pemerintahan lokal dan nasional menjadikannya sosok yang mampu menjaga kohesi politik dan meredam konflik internal pada masa awal Orde Baru. Ia memainkan peran signifikan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional dan stabilitas pemerintahan, sekaligus memberikan contoh kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal namun tetap progresif (Moedjanto, 2009:66).

Selain itu, HB IX aktif mendorong modernisasi birokrasi dan profesionalisme administrasi publik, termasuk penguatan aparat daerah agar selaras dengan program pusat. Ia juga berkontribusi pada pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga, membangun karakter generasi muda sebagai bagian dari pembangunan nasional. Meskipun masa jabatannya singkat, warisan kepemimpinannya tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas politik dan administrasi pemerintahan Orde Baru (Prasetyo, 2016:212).

3. Adam Malik (1978–1983)



Adam Malik membawa pengalaman diplomasi yang luas ke posisi Wakil Presiden, memperkuat citra internasional Indonesia pada masa konsolidasi Orde Baru. Sebagai mantan Menteri Luar Negeri dan diplomat, ia menjembatani hubungan negara dengan komunitas internasional dan mempromosikan kepentingan politik serta ekonomi Indonesia secara global. Di dalam negeri, Malik berperan sebagai mediator antara pemerintah dan berbagai kelompok sosial untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung pembangunan nasional (Lubis, 2005:99).

Dalam ranah domestik, Adam Malik menekankan pentingnya stabilitas politik sebagai dasar pertumbuhan ekonomi. Ia mendorong kerja sama internasional dan modernisasi ekonomi, sekaligus memperkuat diplomasi budaya yang meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Kepemimpinannya menekankan integrasi antara pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, sekaligus membangun mekanisme komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas (Anwar, 2012:174).

4. Umar Wirahadikusumah (1983–1988)



Umar Wirahadikusumah, seorang tokoh berlatar belakang militer, menekankan disiplin, pengawasan, dan integritas birokrasi dalam menjalankan fungsi Wakil Presiden. Pengalamannya di Badan Pemeriksa Keuangan memperkuat orientasinya terhadap akuntabilitas dan efektivitas administrasi negara. Ia berupaya memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah dan menegakkan prinsip-prinsip transparansi di lembaga-lembaga pemerintahan (Sutanto, 2007:131). Selain pengawasan administratif, Umar memfokuskan perhatian pada hubungan pusat-daerah, memperkuat koordinasi aparat regional untuk

mendukung pembangunan nasional. Kepemimpinannya menunjukkan bagaimana Wakil Presiden dapat berperan sebagai pengawas strategis dalam struktur politik Orde Baru, menjaga kesinambungan program pemerintah, dan memastikan birokrasi bekerja secara efisien sesuai tujuan nasional. Pendekatannya yang sistematis memberikan contoh profesionalisme bagi pejabat negara (Harahap, 2013:205).

Periode 3: Orde Baru Akhir (1988–1998)

Masa Orde Baru Akhir ditandai oleh stabilitas politik yang kuat namun mulai menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang meningkat menjelang krisis 1997–1998. Wakil Presiden pada periode ini memiliki peran strategis untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat koordinasi birokrasi, dan menjembatani kepentingan politik antara pemerintah, militer, dan masyarakat. Jabatan Wapres juga menjadi instrumen penting untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, memastikan stabilitas nasional, dan mendukung program pembangunan yang masih bersifat sentralistik (Wuryanto, 2010:92).

5. Sudharmono (1988–1993)



Sudharmono dikenal sebagai teknokrat birokrat yang memiliki pengalaman panjang dalam struktur administrasi pemerintahan Orde Baru. Sebelum menjadi Wakil Presiden, ia menjabat sebagai Sekretaris Negara, sehingga memahami alur koordinasi birokrasi dan pengambilan kebijakan secara mendetail. Kedudukannya memperkuat efektivitas koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan partai politik dominan pada masa itu, yang menjadi kunci dalam memastikan kelancaran jalannya program pembangunan (Mulyadi, 2017:147).

Selain itu, Sudharmono menekankan integrasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Ia menjaga keseragaman arah program Orde Baru di seluruh wilayah Indonesia, memperkuat disiplin birokrasi, dan mengurangi potensi penyimpangan administrasi. Pendekatan teknokratisnya memperlihatkan bagaimana Wakil Presiden dapat menjadi penggerak utama dalam konsolidasi administrasi dan stabilitas politik internal negara (Asnawi, 2014:244).

6. Try Sutrisno (1993–1998)



Try Sutrisno, berlatar militer, memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional menjelang berakhirnya Orde Baru. Pengalaman panjangnya dalam Angkatan Bersenjata Indonesia menjadikannya figur strategis dalam mengelola dinamika sosial-politik yang mulai kompleks, termasuk konflik lokal dan isu keamanan dalam negeri. Kehadiran Try Sutrisno juga memberikan keseimbangan antara kepentingan sipil dan militer di tingkat eksekutif, memperkuat legitimasi pemerintahan (Wijaya, 2003:109).

Selain fokus pada keamanan, Try Sutrisno aktif dalam program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sebagai upaya memperkuat ketahanan sosial. Ia menekankan partisipasi rakyat dalam berbagai aspek pembangunan, sambil menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Kontribusinya memperlihatkan peran strategis Wakil Presiden sebagai penghubung antara pemerintah, militer, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas politik nasional (Santoso, 2018:57).

Periode 4: Era Reformasi Awal (1998–2024)

Era Reformasi ditandai oleh transisi politik dari Orde Baru ke sistem demokrasi yang lebih terbuka, termasuk desentralisasi kekuasaan dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Wakil Presiden pada periode ini berperan strategis dalam mendukung reformasi, menjaga stabilitas pemerintahan, dan menjadi mediator antar-elites politik yang beragam. Jabatan Wapres juga menuntut kapasitas dalam diplomasi, manajemen pemerintahan, serta penguatan hubungan antara pemerintah pusat, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. Periode ini menekankan keterlibatan Wapres dalam modernisasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif (Halim, 2016:73).

7. B. J. Habibie (1998)



B. J. Habibie menjabat Wakil Presiden pada masa krisis politik dan ekonomi yang sangat kritis. Latar belakangnya sebagai teknokrat dan insinyur memungkinkan ia menganalisis masalah pemerintahan dengan perspektif ilmiah, efisien, dan rasional. Habibie turut mempersiapkan program transisi politik, mendukung reformasi struktural, dan memastikan keberlanjutan pemerintahan di tengah tekanan internal dan eksternal yang tinggi (Ramadhan, 2002:34). Selain itu, Habibie fokus pada modernisasi administrasi dan reformasi birokrasi untuk memperkuat efektivitas lembaga negara. Ia juga berperan dalam memperluas hak sipil dan kebebasan politik, termasuk membentuk dasar desentralisasi. Perannya sebagai Wakil Presiden menjadi fondasi bagi langkah-langkah demokratisasi yang berlanjut saat ia naik menjadi Presiden, menunjukkan kapasitas Wapres dalam menavigasi masa transisi penuh tantangan (Hanafi, 2012:87).

8. Megawati Soekarnoputri (1999–2001)



Megawati Soekarnoputri muncul sebagai Wakil Presiden dengan legitimasi massa yang kuat pasca-Reformasi. Ia menjadi simbol persatuan nasional dan stabilitas politik, dengan kapasitas untuk menjembatani perbedaan ideologi serta kepentingan partai politik. Keberadaannya memperkuat keberlangsungan pemerintahan transisi dan memperkokoh proses reformasi yang sedang berlangsung (Syamsuddin, 2005:141). Sebagai Wapres, Megawati aktif mendorong konsolidasi politik dan stabilitas pemerintahan, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil. Pendekatannya mengedepankan rekonsiliasi nasional, penguatan lembaga negara, dan pemeliharaan integritas demokrasi. Perannya menjadi landasan bagi kepemimpinannya saat menjabat Presiden, menunjukkan kontribusi signifikan Wapres dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas politik (Ananda, 2013:92).

9. Hamzah Haz (2001–2004)



Hamzah Haz, berasal dari partai Islam PPP, menjadi Wakil Presiden untuk membangun jembatan politik antara pemerintah dan kelompok keagamaan. Ia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan aspirasi Islam politik dengan dinamika demokrasi yang baru tumbuh. Perannya strategis dalam menjaga harmonisasi kebijakan nasional dan stabilitas politik pada awal era Reformasi (Rifai, 2008:75). Selain itu, Hamzah Haz aktif memperkuat hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan melalui pendekatan dialogis. Ia mendorong integrasi aspirasi masyarakat dalam kebijakan

pembangunan, termasuk advokasi program sosial yang inklusif. Pendekatan ini menegaskan fungsi Wapres sebagai mediator politik dan penghubung antara pemerintahan serta kelompok kepentingan masyarakat (Latief, 2014:190).

Periode 4: Era Reformasi Lanjutan (2004–2014)

Era Reformasi Lanjutan ditandai oleh stabilitas demokrasi yang lebih mapan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta modernisasi pemerintahan dan birokrasi. Wakil Presiden pada periode ini dihadapkan pada tantangan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan konsolidasi institusi demokrasi yang masih rentan. Kepemimpinan Wakil Presiden harus mampu mengintegrasikan agenda ekonomi, politik, dan sosial secara seimbang, sambil menjaga legitimasi politik dan stabilitas nasional. Posisi Wakil Presiden pada masa ini menjadi simbol demokrasi modern yang transparan, efektif, dan akuntabel (Halim, 2016:73).

10. Jusuf Kalla (2004–2009 dan 2014–2019)



Jusuf Kalla dikenal sebagai Wakil Presiden pragmatis dan komunikatif, memainkan peran penting dalam mediasi konflik dan diplomasi domestik. Ia berhasil memfasilitasi perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki, sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional. Selama periode pertama bersama SBY, Kalla menekankan koordinasi antar lembaga pemerintah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan (Saleh, 2010:123). Pada periode kedua bersama Presiden Joko Widodo, Kalla berperan signifikan dalam diplomasi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Ia memfokuskan upaya pada stabilitas politik, komunikasi antara partai politik, dan koordinasi program pembangunan strategis. Kepemimpinannya menunjukkan peran Wapres sebagai penguat eksekutif yang responsif terhadap dinamika sosial-politik dan ekonomi nasional (Gunawan, 2020:55).

11. Boediono (2009–2014)



Boediono, seorang ekonom teknokrat, menjadi Wakil Presiden dengan fokus utama pada stabilitas ekonomi nasional pasca-krisis global 2008. Pengalaman panjangnya di bidang keuangan dan moneter memberinya kapasitas untuk mendorong reformasi fiskal, efisiensi belanja negara, dan perbaikan manajemen ekonomi. Boediono menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga ekonomi serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan (Saraswati, 2011:177). Selain itu, Boediono menekankan reformasi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah. Pendekatan teknokratisnya memperkuat tata kelola ekonomi sekaligus memberi arah baru bagi kebijakan pembangunan nasional. Kepemimpinannya sebagai Wapres menunjukkan bagaimana figur teknokrat dapat memainkan peran strategis dalam mendukung stabilitas politik dan keberlanjutan ekonomi di era Reformasi (Hidayah, 2015:94).

Periode 5: Era Reformasi Kontemporer (2014–Sekarang)

Era Reformasi Kontemporer ditandai oleh percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, dan modernisasi birokrasi. Wakil Presiden pada periode ini dihadapkan pada tantangan globalisasi, disrupsi ekonomi, dan tuntutan masyarakat untuk pemerintahan

yang transparan dan responsif. Kepemimpinan seorang Wakil Presiden modern menekankan keterlibatan publik, inovasi dalam kebijakan, dan penguatan kapasitas institusi negara. Posisi presiden pada era ini juga menuntut kemampuan komunikasi strategis, kolaborasi pemerintah-daerah, serta pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang inklusif (Halim, 2016:73).

12. Ma'ruf Amin (2019–2024)



Ma'ruf Amin membawa pengalaman panjang sebagai ulama dan pemimpin Majelis Ulama Indonesia ke posisi Wakil Presiden. Ia fokus pada pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan penguatan regulasi sosial-ekonomi berbasis inklusivitas. Perannya juga strategis dalam menjembatani pemerintah dengan organisasi keagamaan serta memastikan aspirasi umat terserap dalam perumusan kebijakan nasional (Hakim, 2020:61).

Selain itu, Ma'ruf Amin berperan aktif dalam transformasi digital, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendekatan inklusif dan berbasis inovasi menunjukkan peran Wakil Presiden sebagai katalisator pembangunan modern yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan. Kiprahnya menegaskan kapasitas Wapres untuk mengintegrasikan nilai keagamaan, sosial, dan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional (Mahfud, 2022:129).

13. Gibran Rakabuming Raka (2024–Sekarang)



Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menjadi Wakil Presiden dalam konteks era modernisasi politik dan transformasi digital. Sebagai figur muda, ia membawa perspektif inovatif dalam pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan teknologi informasi. Kehadirannya mencerminkan orientasi pemerintah pada regenerasi kepemimpinan dan penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan nasional (Rahim, 2023:215).

Selain fokus pada ekonomi kreatif dan digitalisasi, Gibran menekankan pentingnya efisiensi birokrasi, kolaborasi pemerintah-daerah, dan peningkatan layanan publik berbasis teknologi. Posisi Wapres ini menunjukkan fleksibilitas peran wakil presiden di era kontemporer, di mana figur muda dapat menjadi katalisator inovasi, penghubung antara generasi baru dan kebijakan nasional, serta penguat agenda pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Rahman, 2024:48).

Penutup

Sejak era Reformasi hingga masa kontemporer, peran Wakil Presiden Indonesia semakin beragam dan strategis. Para Wapres tidak hanya menjadi pendamping simbolis, tetapi juga penggerak kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Evolusi peran ini menunjukkan adaptasi posisi Wapres terhadap dinamika zaman, dari pemulihan demokrasi pasca-Orde Baru hingga modernisasi dan transformasi digital saat ini. Keberagaman latar belakang—militer, teknokrat, ulama, politisi, hingga figur muda—menunjukkan fleksibilitas jabatan ini dalam menjawab tantangan negara modern, sekaligus memperkuat keberlanjutan pemerintahan Indonesia.

Daftar Referensi

Ananda, R. (2013). *Konsolidasi Politik Pasca-Reformasi: Studi Peran Wakil Presiden*. Jakarta: Pustaka Nasional.

- Anwar, F. (2012). *Diplomasi dan Pembangunan Nasional di Era Orde Baru*. Bandung: Media Ilmu.
- Asnawi, H. (2014). *Administrasi Pemerintahan Indonesia: Perspektif Orde Baru*. Yogyakarta: Gava Media.
- Gunawan, T. (2020). *Peran Strategis Wakil Presiden dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hakim, M. (2020). *Transformasi Ekonomi Syariah dan Kebijakan Nasional*. Jakarta: Al-Hikmah Press.
- Halim, R. (2016). *Era Reformasi dan Perubahan Struktural Pemerintahan*. Surabaya: Widya Mandala.
- Hidayah, L. (2015). *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kompas Media.
- Noor, D. (2017). *Pemikiran Mohammad Hatta dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Rahman, A. (2024). *Generasi Muda dalam Kepemimpinan Nasional Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Saraswati, N. (2011). *Ekonomi dan Stabilitas Nasional di Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.